

# Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo

Jodi Rizki Kusuma<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya - Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received November, 14 2020

Received in revised form December, 7 2020

Accepted December, 11 2020

Available online December, 29 2020

### Kata Kunci:

Kebijakan pemerintahan, perekonomian Indonesia, periode presiden

### Keywords:

Government policy, Indonesian economy, president period.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kondisi perekonomian antara era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era presiden Joko Widodo pada periode pertama mereka. GDP, konsumsi, Investasi dan ekspor neto menjadi variabel dalam perhitungan perekonomian. Sampel diambil dari periode pertama masing masing presiden, dengan periode waktu 2005-2009, dan 2015-2019. Analisis data runtut waktu menggunakan data dari pihak ketiga yang di uji menggunakan uji independen t sampel bebas. Hasil penelitian menunjukan perbedaan yang signifikan dari masing masing variabel. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa program kerja pemerintah yang fokus pada pemerataan ekonomi menunjukan peningkatan GDP, konsumsi & investasi. Sedangkan dalam program kerja pemerintah yang fokus untuk stabilisasi dalam negeri menunjukan ekspor neto yang meningkat.

## ABSTRACT

This research want to test economic condition between two president, Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo, on their first period. GDP, consumption, investment, and net export is become a variable in this economic calculations. Sample was taken from the first period of each periode president. With period of time 2005-2009, and 2015-2019. Time series data analysis using data from third parties, and test using independent sample t-test. The result of research found that the GDP, consumption, investment, and net export have a significant difference of each variable. Result of research an explanation that government work programs that focus on economic equity show an increase in GDP, consumption & investment. Meanwhile, the government work program that focuses on domestic stabilization shows that net exports have increased.

Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.

\* Corresponding author.

E-mail: [jodirizki22@gmail.com](mailto:jodirizki22@gmail.com) (Jodi Rizki Kusuma)

## 1. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia telah silih berganti presiden sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan. Kepemimpinan dari seorang presiden diibaratkan seperti nahkoda yang membawa kapal untuk dapat melindungi penumpangnya dalam merintangai lautan yang luas. Kadang badai dan gelombang laut yang tinggi menghantam kapal, sehingga seorang presiden harus siap menghadapinya. Perumpamaan tersebut mengindikasikan presiden dalam pemerintah memiliki tugas penting untuk pelayanan, pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, seperti dalam penelitian dari Ayu Putriyanti (2015: 181).

Silih ganti presiden membawa Indonesia ke berbagai kondisi, hal ini tidak hanya disebabkan kondisi dari dalam negeri, namun juga disebabkan dari kondisi eksternal dari luar negeri. Begitu pula dalam pengambilan kebijakan dari masing masing presiden, untuk dapat menyeimbangkan kondisi dari dalam dan luar negeri maka butuh pengambilan kebijakan yang tepat, sebab pengambilan kebijakan yang dilakukan akan mempengaruhi kondisi dari negara, sesuai dengan pernyataan Stiglitz dalam Harisdiana (2020: 5). Masa pemerintahan presiden sebagai regulator bertujuan untuk pengaturan perekonomian negara, seperti dalam aktivitas perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, dan peraturan untuk subsidi. Dengan proses politik yang dapat dilakukan oleh presiden membuat supremasi kebijakan menjadi alat yang kuat dalam mempengaruhi jalan perekonomian dalam negeri, seperti yang diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alan dan Mark (2014: 35).

PDB menjadi alat ukur dalam mengetahui tingkat produktivitas suatu negara untuk melihat tingkat kemakmuran bagi masyarakat-nya, sesuai yang disebutkan oleh Rahardja dan Manurung (2008: 30, sedangkan konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses berjalan nya perputaran ekonomi, hal ini disebabkan masyarakat melakukan transaksi untuk kebutuhan mereka, yang dimana mempengaruhi pendapatan sektor produk. Selain itu Investasi dibutuhkan sebagai modal bagi produsen untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Peningkatan produksi dari produsen mampu membuat mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi ke luar negeri, dalam hal ini proses aktifitas ekonomi mempengaruhi perekonomian dalam negeri, namun jika kebijakan pemerintah tidak tepat maka aktifitas ekonomi tersebut bisa terganggu, seperti yang disampaikan oleh Windi (2018: 195).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kepala negara dan kepala pemerintah ke 6, pembentukan kabinet indonesia bersatu membantu program kerja serta menjalankan visi dan misi dari presiden. Kebijakan program kerja yang dilakukan fokus pada kebijakan *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*, pengambilan keputusan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden untuk stabilisasi dalam negeri. Jika dilihat dari kinerja pemerintahan selama 5 tahun, menunjukkan total rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005–2009 stabil di atas 5% (BPS: 2010). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disebabkan karena adanya faktor eksternal negara, yaitu dari *commodity boom* yang terjadi, ketika harga komoditas SDA seperti minyak, logam, bahan tambang, dan sejenisnya sedang naik maka terjadi peningkatan pendapatan negara, hal tersebut didukung dengan permintaan komoditas SDA dari negara dengan permintaan konsumsi yang tinggi seperti China, Brazil & India, dalam Wihardja (2016:42). Indonesia memanfaatkan peluang tersebut untuk dapat melakukan ekspor, dan dengan surplus pendapatan yang diperoleh, pemerintah memanfaatkannya untuk peningkatan perekonomian dalam negeri, seperti bantuan kredit mikro ke UMKM, subsidi bahan bakar kendaraan, bantuan langsung tunai untuk masyarakat, dan berbagai bantuan lain dari pemerintah. Keunggulan ekonomi lain adalah konsumsi masyarakat yang sangat tinggi, diikuti konsumsi pemerintah yang meningkat, investasi menunjukan peningkatan yang baik, dan ekspor neto yang kuat, menghasilkan perekonomian indonesia yang stabil dengan PDB tahunan yang solid dan pemerintah tetap komprehensif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ke 7, pembentukan kabinet kerja menjadi kelompok untuk menjalankan visi dan misi presiden. Program kebijakan pemerintah cenderung pada pengambilan kebijakan untuk pemerataan kondisi bagi setiap daerah di Indonesia, dengan program *nawacita* presiden Joko Widodo sebagai tujuan pemerintahan. Jika dilihat pada masa awal pemerintahan, ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 4,79%, namun setelah 4 tahun pemerintahan, perekonomian mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, hingga akhirnya tumbuh secara total rata-rata di akhir masa jabatan sebesar 5,02% di tahun 2019 (BPS: 2020). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran dan kebijakan yang diberikan oleh presiden, seperti paket kebijakan ekonomi 1 sampai 16, perbaikan regulasi dan pemerataan pembangunan. Kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan menjadikan indonesia tempat layak investasi, sehingga sektor industri dapat menyerap tenaga kerja, pengendalian harga untuk daya beli konsumsi masyarakat, dan berbagai kebijakan lain (Kemenkeu: 2016).

Terlihat dari masa awal pemerintahan kedua presiden, sama-sama mengeluarkan kebijakan untuk ketahanan ekonomi negara, serta dalam menumbuhkan PDB dalam negeri. Kebijakan pemerintah kabinet indonesia bersatu didukung atas kenaikan harga komoditas SDA Indonesia, sehingga nilai PDB ditopang dari ekspor negara yang meningkat, dan didukung konsumsi masyarakat dan pemerintah yang meningkat pesat, serta investasi yang sedang tumbuh. Lain halnya dengan kebijakan pemerintah kabinet kerja, masa pemerintahan kabinet didukung dengan pengendalian kebijakan ekonomi yang kuat dari pemerintahan, seperti paket ekonomi 1 sampai 16, penyerdehanaan regulasi, dan sebagainya, sehingga dalam masa pemerintahan kabinet kerja dapat mewujudkan tingkat PDB yang tinggi walaupun sektor ekspor mengalami penurunan, namun dapat ditopang dari konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tinggi, dan keran investasi yang meningkat pesat. Dengan hal tersebut terdapat gap penelitian untuk mengetahui kebijakan di era presiden siapa yang menunjukan perekonomian terbaik, dengan diukur dalam PDB, konsumsi, investasi dan ekspor neto.

Pengembangan hipotesis dapat dijelaskan seperti berikut, H1 : konsumsi, investasi, ekspor neto, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diduga terdapat perbedaan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja, H2 : Situasi perekonomian pada pemerintah kabinet indonesia bersatu diduga lebih baik dari pada kondisi perekonomian pemerintah kabinet kerja berdasarkan variabel yang tersedia, H3 : Situasi perekonomian pada pemerintah kabinet kerja diduga lebih baik dari pada kondisi perekonomian pemerintah kabinet indonesia bersatu berdasarkan variabel yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, serta hipotesis yang akan dibahas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan perekonomian pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era pemerintahan presiden Joko Widodo dan membandingkan pengaruh perekonomian antar pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan presiden Joko Widodo.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 207), teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Teknik ini berfungsi untuk pengukuran perbedaan PDB, investasi, ekspor neto, dan konsumsi dari era pemerintah kabinet indonesia bersatu dan era pemerintah kabinet kerja.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dengan jenis data time series (runtut waktu). Dengan pengambilan data periode pertama kedua presiden menjabat, yaitu tahun 2005 – 2009 dan tahun 2015 – 2019, dengan penetapan data nilai triliun rupiah untuk PDB, konsumsi, dan investasi dengan menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dan ekspor neto menggunakan juta us dollar dengan nilai dollar yang berlaku di tahun tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data diperoleh dari berbagai instansi pemerintah seperti badan pusat statistik (BPS), badan koordinasi penanaman modal (BPKM), dan kementerian perdagangan (kemendag), serta sumber lainnya yaitu jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian menggunakan metode analisis statistik. Pengujian hipotesis uji beda rata rata (uji beda mean) merupakan metode analisis statistik yang akan digunakan. Fungsi dari pengujian tersebut adalah untuk membandingkan secara rata-rata hasil dari kelompok data, juga bisa digunakan untuk perbedaan antar 2 kelompok data. Dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai analisis terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, karena data yang digunakan kurang dari 30 data. Untuk menghitung statistik uji t sampel bebas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{X_1 - X_2}{Sp \sqrt{\left\{ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right\}}}$$

Hipotesis dalam pengujian perbedaan mean dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a.  $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2$  (tidak terdapat perbedaan pada variabel yang ditentukan antara masa pemerintah kabinet indonesia bersatu dan masa pemerintah kabinet kerja)
- b.  $H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2$  (terdapat perbedaan pada variabel yang ditentukan antara masa pemerintah kabinet indonesia bersatu dan masa pemerintah kabinet kerja)

Dimana:  $\alpha_1$  = kondisi perekonomian era pemerintah kabinet indonesia bersatu

$\alpha_2$  = kondisi perekonomian era pemerintah kabinet kerja

Peneliti melakukan interpretasi dan kesimpulan terhadap hipotesis yang dipaparkan, pengujian untuk mengetahui perbedaan rata-rata antar kedua era pemerintahan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan uji t sampel bebas sebagai proses pengujian untuk mendapatkan hasil perbedaan rata-rata.

Hasil uji beda dua rata-rata pada pengujian tersebut menggunakan SPSS versi 26. Data sampel dibuat dalam bentuk variabel, dengan proses analisis pada tabel *independent t-test*. Pengambilan *confidence interval* sebesar 95% ( $t$ -tabel = 0,05). Hasil dari analisis pengujian menampilkan dua tabel yaitu tabel *group statistic* dan tabel *independent sample test*. Pada tabel *group statistic* ditampilkan jumlah data, *mean* (rata-rata) dan *Std. Deviation* (simpangan baku) dari variabel yang di uji. Sedangkan pada tabel *independent sample test* menampilkan hasil uji t dari variabel yang di uji, tujuan dari adanya hasil uji t adalah untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak ataupun diterima, dengan syarat pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Jika hasil  $t$  hitung  $< t$  tabel (0,05), maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi perekonomian kedua era pemerintahan.
- b. Jika hasil  $t$  hitung  $> t$  tabel (0,05), maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi perekonomian kedua era pemerintahan.

Setelah melewati tahap pengujian, maka dapat dilakukan interpretasi dan kesimpulan terhadap pengujian hipotesis untuk menentukan apakah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Atau sebaliknya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### 3. Hasil dan pembahasan

Hasil analisis yang dilakukan menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, data variabel menggunakan jenjang waktu 5 tahun masa jabatan awal presiden, yaitu di tahun 2005-2009 dan tahun 2015-2019. Dari data yang telah terkumpul akan di uji menggunakan analisis uji t sampel bebas, dan diolah dengan menggunakan software SPSS versi 26 untuk dapat membentuk model estimasi seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1.** *Group Statistic*

	<b>Pemerintahan</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
PDB	PDB era presiden Susilo Bambang Yudhoyono	5	6525,940	684,9420
	PDB era presiden jokowi	5	9621,760	634,9875
Konsumsi	Konsumsi era presiden Susilo Bambang Yudhoyono	5	2535,860	621,5767
	Konsumsi era presiden jokowi	5	5395,040	416,7622
Investasi	Investasi era presiden Susilo Bambang Yudhoyono	5	129,560	39,1071
	Investasi era presiden jokowi	5	681,760	92,3530
Ekspor neto	Ekspor neto era presiden Susilo Bambang Yudhoyono	5	26827,940	13483,5316
	Ekspor neto era presiden jokowi	5	3350,780	8977,3450

Sumber: data olahan dari peneliti

Tabel 1 menunjukkan n sebesar 5, yang menunjukkan data tahun yang diteliti pada masing masing pemerintahan presiden pada kelompok perekonomian. Pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu, hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 2535,860, 129,560, 26827,940 dan 6525,940. Lalu dalam masa pemerintahan kabinet kerja, hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu, 5395,04, 681,76, 3350,78 dan 9621,760. Standar deviasi (Simpangan) pada pemerintahan kabinet indonesia bersatu dari hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 621,5767, 39,1071, 13483,5316 dan 684,9420. Standar deviasi (Simpangan) pada pemerintahan kabinet kerja dari hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 416,762, 92,353, 8977,345 dan 634,9875. Hasil estimasi yang telah dilakukan pada spss akan dijelaskan berikut, penjelasan diperlukan untuk menunjukkan perbandingan masing masing variabel perekonomian.

### Kondisi PDB masing masing pemerintahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa, PDB pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukkan rata-rata (*mean*) PDB sebesar 6525,940, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 9621,760. Hal itu menandakan bahwa PDB pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata (*mean*) variabel PDB pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 684,9420. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukkan angka sebesar 634,9875.

### Kondisi konsumsi masing masing pemerintahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa, konsumsi pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukkan rata-rata (*mean*) konsumsi sebesar 2535,860, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 5395,040. Hal itu menandakan bahwa konsumsi pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata (*mean*) variabel konsumsi pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 621,5767. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukkan angka sebesar 416,7622.

### Kondisi investasi masing masing pemerintahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa, investasi pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukkan rata-rata (*mean*) investasi sebesar 129,560, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 681,760. Hal itu menandakan bahwa investasi pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata (*mean*) variabel investasi pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 39,1071. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukkan angka sebesar 92,3530.

### Kondisi ekspor neto masing masing pemerintahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa, ekspor neto pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukkan rata-rata (*mean*) ekspor neto sebesar 26827,940, lebih besar dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 3350,780. Hal ini menandakan bahwa ekspor neto pemerintahan kabinet indonesia bersatu lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet kerja. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata (*mean*) variabel investasi pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 13483,5316. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukkan angka sebesar 8977,3450.

### Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*) bertujuan mengetahui perbedaan konsumsi, investasi, ekspor neto, dan PDB, sekaligus sebagai perbandingan pada pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja, tabel berikut ini akan menampilkan hasil analisis yang di uji dalam masing-masing variabel dari masa kedua pemerintahan.

Tabel 2. *independent sample test*

Variabel	t-test for equality of means				
	T	DF	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PDB	-7,411	8	0,000	-3095,8200	417,6972
Konsumsi	-8,543	8	0,000	-2859,1800	334,6784
Investasi	-12,312	8	0,000	-552,2000	44,8519
Ekspor neto	3,241	8	0,012	23477,1600	7244,2853

Sumber : data olahan dari peneliti

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa, t hitung dalam variabel PDB pada uji *independent sample test* adalah sebesar -7,411 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000

< 0,05), maka dapat dikatakan PDB nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja. Sedangkan dalam t hitung dalam variabel konsumsi pada uji *independent sample test* sebesar -8,543 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), maka dapat dikatakan konsumsi nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja. Pada t hitung untuk investasi pada uji *independent sample test* adalah sebesar -12,312 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), maka dapat dikatakan investasi nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja. Dan pada t hitung untuk ekspor neto dengan menggunakan uji *independent sample test* adalah sebesar 3,241 dengan signifikan sebesar 0,012. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,012 < 0,05), maka dapat dikatakan ekspor neto nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja.

## Pembahasan

Hasil pada uji statistik independen sampel t-test menunjukkan bahwa kondisi PDB, konsumsi, investasi, dan ekspor neto pada era kedua pemerintahan presiden mempunyai perbedaan yang signifikan, terlihat dari analisis uji t sampel bebas bahwa terdapat perbedaan mean yang cukup besar dari variabel PDB, konsumsi, investasi & ekspor neto dari masing masing presiden. sehingga dapat terlihat dalam penjelasan dari masing masing era presiden untuk mendapatkan penjelasan dari uji yang telah dilakukan.

Nilai PDB pemerintahan kabinet indonesia bersatu mempunyai rata-rata (*mean*) PDB sebesar 6525,940, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 9621,760. Hal tersebut menandakan bahwa PDB pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukkan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukkan t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja. ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dimana  $H_1$  = terdapat perbedaan). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Capkova & Rancakova (2013: 383) yang menemukan bahwa nilai PDB mengalami pertumbuhan nilai yang besar, dengan didukung dari pemerintahan dengan fokus kebijakan untuk pemerataan perekonomian.

Nilai konsumsi pemerintahan kabinet indonesia bersatu mempunyai rata-rata (*mean*) konsumsi sebesar 2535,860, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 5395,040. Hal itu menandakan bahwa konsumsi pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukkan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukkan t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja. ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dimana  $H_1$  = terdapat perbedaan). Hasil penelitian ini menguatkan penelitian dari Ergete (2014:28) yang menemukan bahwa dalam kebijakan untuk pemerataan ekonomi, terjadi kenaikan pendapatan perkapita, yang akhirnya meningkatkan konsumsi dari masyarakat.

Nilai investasi pemerintahan kabinet indonesia bersatu mempunyai rata-rata (*mean*) investasi sebesar 129,560, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 681,760. Hal itu menandakan bahwa investasi pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukkan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono dan pemerintahan presiden Joko Widodo. ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dimana  $H_1$  = terdapat perbedaan). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Hindriks, *et al.* (2008: 2399) Menyatakan bahwa terdapat kenaikan investasi pada negara yang melakukan kebijakan dalam pemerataan kondisi ekonomi.

Nilai ekspor neto pemerintahan kabinet indonesia bersatu mempunyai rata-rata (*mean*) ekspor neto sebesar 26827,940, lebih besar dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 3350,780. Hal ini menandakan bahwa ekspor neto pemerintahan kabinet indonesia bersatu lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet kerja. Sekaligus menunjukkan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet indonesia bersatu lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,012 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja. ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dimana  $H_1$  = terdapat perbedaan). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Coxhead dan Jayasuriya (2010: 549), bahwa *commodity boom* yang terjadi di China dan India membuat

pemerintahan di negara tersebut dapat melakukan peningkatan untuk proses stabilisasi dalam negeri mereka.

#### 4. Simpulan dan saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PDB, konsumsi, investasi dan ekspor neto yang signifikan antara kedua era pemerintahan. Kondisi PDB, konsumsi, & investasi era kabinet kerja presiden Joko Widodo dari proses pengujian sampel t test menunjukkan hasil lebih signifikan dengan menunjukkan perbedaan rata-rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan dengan era kabinet indonesia bersatu presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri era pemerintahan Joko Widodo lebih baik. Sedangkan dalam kondisi ekspor neto dari proses pengujian sampel t test pada era kabinet indonesia bersatu presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat perbedaan signifikan dengan menunjukkan perbedaan rata-rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan dengan era kabinet kerja presiden Joko Widodo, dapat disimpulkan perekonomian luar negeri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik.

Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk tetap selaras dalam pengambilan kebijakan pada sektor ekonomi, karena pengambilan kebijakan jelas sangat mempengaruhi perekonomian indonesia, setiap pemerintahan mempunyai tujuan yang jelas dan baik untuk masyarakat-nya, hanya saja mengimplemetasikan kebijakan presiden cukup sulit jika tidak ditopang dengan pelaku pengerjaan kebijakan yang cepat dan tanggap dalam proses untuk pengimplementasikan kebijakan presiden.

#### Daftar Rujukan

- Alan, S. B. (2014). *Presidents and the U.S. Economy: An Econometric Exploration*. Princeton university paper. pp. 1-63.
- BPS. (2010). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2005-2009'*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/4923ba3ffd04cd25e83dcd97/pdb-indonesia-triwulanan-2015-2019.html>. 23 Oktober 2020 (21:30)
- BPS. (2020). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2015-2019*. <https://www.bps.go.id/publication/2009/08/15/176e7a83ae816cd1e8de9bcd/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2005-2009.html>. 23 Oktober 2020 (21:25)
- Capkova, S. & Rancakova, L. (2013). *Fiscal Equalization and Regional Growth*. European Scientific Institute, ESI, 2013. - 3 vol. (607, 337, 383 p.). pp. 376-384.
- Coxhead, I. & Jayasuriya, S. (2010). China, India and the Commodity Boom: Economic and Environmental Implications for Low-income Countries. *The World Economy* (2010), 33(4). pp. 525-551.
- Ergete, F. (2014). *The Incentive Effects of Equalization Grants on Fiscal Policy*. SPP Research Papers Volume 7 - Issue 23. pp 1-31.
- Harisdiana. (2020). *Berbagai Isu Ekonomi Mutakhir dan Strategi Pembangunan Ekonomi Tingkat Global Memasuki Awal Abad ke 21: Kajian Singkat Berbasis Survey Literatur tentang Gagasan dan Konsep dari Beberapa Ekonom Ternama Tingkat Dunia*. Makalah. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Hindriks, J. S, Peralta & Weber, S. (2008). *Competing in Taxes and Investment Under Fiscal Equalization*. *Journal of Public Economics* 92 (2008). pp. 2392-2402.
- Kemenkeu. (2016). *Media Keuangan: Langkah Taktis Paket Kebijakan Ekonomi*. [https://www.kemenkeu.go.id/media/4981/media-keuangan-juli\\_0.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/4981/media-keuangan-juli_0.pdf). 23 Oktober 2020 (21:29).
- Rahardja, P. & Mandala, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro, edisi keempat'*. lembaga penerbit FE UI. Depok.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Putriyanti, A. (2015). *Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Pandecta Unnes* Volume 10. Nomor 2. December 2015. hh. 180-194.
- Wihardja, M. M. (2016). *The Effect of the Commodity Boom on Indonesia's Macroeconomic Fundamentals and Industrial Development*. *International Organisations Research Journal*. Vol. 11. No 1 (2016). pp 39-54.
- Windi, R. A. (2018). *Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia*. *Economics Development Analysis Journal* 7 (2) (2018). hh 194-202.